

**HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA
SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :
ALI QUDSI
NIM : 14360062

PEMBIMBING :
Prof.Dr.H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1438**

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Korban penyalahgunaan narkoba menjadi dilema di Masyarakat yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini menyebabkan bertambahnya pengguna maupun pengedar narkoba baik di Kota maupun di Pelosok desa. Untuk mencegah hal itu, perlu adanya tindakan keras salah satunya dengan sanksi hukuman mati berdasarkan UU. No 35 tahun 2009. Sehingga, sebagian masyarakat berpendapat hukuman mati sudah tepat, karena orang-orang itu telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap manusia lainnya yang di luar batas perikemanusiaan, karena hak asasi korban juga harus diperhatikan, tidak saja pada pihak pelaku. Sedangkan yang menolak diterapkannya hukuman mati lebih beralasan pada sisi kemanusiaan karena hukuman ini dinilai terlalu kejam dan jelas akan menutup kesempatan si terpidana untuk bertobat dan memperbaiki diri. Selain itu, alasan lainnya lebih mendasarkan pada sisi religius, bahwa mati hidupnya seseorang merupakan urusan Tuhan, Sang Pencipta, bukan pada hak manusia ataupun negara. Pada realitasnya pidana yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba tidak pernah menimbulkan efek jera bagi mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut, Bagaimana alasan hukum Islam dan hukum positif menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan kriteria apa saja yang mendasari bahwa pengedar narkoba di hukum mati menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian di analisis dicari persamaan dan perbedaannya.

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif-komparatif. Yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci. Penggunaan metode tersebut karena dalam skripsi ini akan membandingkan dan menganalisis mengenai sanksi hukuman terhadap pengedar narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, dengan alasan akibat dari penyalahgunaan narkoba sangat banyak mudharatnya. Salah satunya mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan merusak generasi anak bangsa. Maka layak pengedar narkoba dijatuhi hukuman mati. Pengambilan hukum yang digunakan keduanya berbeda, hukum positif menggunakan pasal 113 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan hadist. Persamaan yang mendasari keduanya membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali. Perbedaannya adalah hukum positif menjatuhkan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu seberapa berat serta jenis narkoba yang diedarkan, Sedangkan hukum Islam membolehkan hukuman mati hanya berupa *ta'zir* yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dalam sebuah penentuan sanksi pidana. Apabila orang tersebut yang kerusakannya tidak bisa dihentikan. satu-satunya jalan untuk mendukung dieksekusinya terpidana kasus narkoba yang sangat merusak adalah dengan hukum *ta'zir* berupa pidana mati. Hukum Islam tidak melihat seberapa berat yang diedarkan tetapi dilihat apakah orang tersebut yang kerusakannya bisa dihentikan atau tidak.

Keywords: Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba, Hukum Islam dan Hukum Positif.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Qudsi

Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Ali Qudsi
Nim	: 14360062
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 November 2018 M.

30 Safar 1439 H
Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A
NIP. 19680611 199403 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Marsda Adisucipto Teip. (02/4) 512840 Fax (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3141/Un.02/Ds/PP.009/11/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI QUDSI

Nomor Induk Mahasiswa : 14360062

Telah diujikan pada : Jumat, 16 November 2018

Nilai Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 1999403 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 16 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ali Qudsi
Nim : 14360062
Semester : IX
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, **“HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 November 2018 M
30 Safar 1440 H
Penyusun



Ali Qudsi

14360062

MOTTO

في سبيل
يرجع
(H.R. TIRMIDZI)

عليه
حتى

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**(Alm) Ayahanda salehuddin, dan Ibunda Karimah, beserta
Kakak Kandungku Immamatur Rahima, terimakasih atas
Limpahan Doa dan Kasih sayang yang tak terhingga dan selalu
memberikan yang terbaik.**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Seluruh Masyaikh PP
Annuqayah, Muallim dan Guru Penyusun, dan Pencinta Ilmu
Hukum.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>B</i> ’	B	Be
ت	<i>T</i> ’	T	Te
ث	’	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i> ’	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Kh</i> ’	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>al</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>R</i> ’	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>S n</i>	S	Es
ش	<i>Sy n</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>d</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>D d</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>T</i> ’	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Z ’	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	F ’	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El
م	M m	M	Em
ن	N n	N	En
و	Waw	W	We
ه	H ’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasyd d* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘ qid n</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *T ’marb tah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni‘matull h</i>
-----------	---------	--------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-sam '</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-fur ḍ</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أما

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. Beserta Staf dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

5. Pembimbing Skripsi Bapak Prof.Dr.H. Susiknan Azhari, M.A (semoga Allah menjaganya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun (Alm) Bapak Salehuddin dan Ibu Karimah, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Kakakku Immamatur Rahima yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di SDN Prancak III, Madrasah Diniyah Raudlatul Ikhsan, Madrasah Tsanawiyah 1 Annuqayah, dan Sekolah Menengah Atas 1 Annuqayah. Khusus kepada Alm. KH. Ahmad Basyir Abdullah Sajjad (Semoga Allah menempatkan beliau di surganya) yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun,
9. Keluarga besar penyusun, baik keluarga yang dari Bapak maupun keluarga yang dari Ibu. Khusus kepada Minkhatul Maula sekeluarga yang dengan tulus membantu penyusun, smoga apa yang telah berikan kepada penyusun bisa dibalas dengan pahala terbaik dari Allah.
10. Teman-teman Seperjuangan kuliah maupun skripsi, Adit, Cahyo, Ifur, Wahed, Sigit, Nuruzzaman, Izzat, Jundi, Gustara, Fausen dan teman-teman ku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

11. Seluruh crew café (Ayumi, Bento, Nemo, E-plus), khusus kepada Khairul Umam Bento sebagai owner café (smoga usahanya tambah lancar dan bermanfaat), yang telah membantu penyusun banyak hal.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018 M
10 Safar 1440 H

Penyusun



Ali Qudsi

14360062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Pendekatan Masalah.....	22
5. Analisis Data	22

G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG NARKOBA.....	24
A. Definisi Narkoba.....	24
B. Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba.....	28
C. Hukuman Mati dalam hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
1. Hukuman Mati menurut Hukum Islam.....	34
2. Hukuman Mati menurut Hukum Positif	36
D. Permasalahan Narkoba di Indonesia.....	37
E. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Narkoba ...	43
F. Sejarah pembentukan Undang-Undang Narkotika	46
G. Tindak pidana Narkoba dalam hukum Islam dan Hukum Positif	52
BAB III. HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM	
 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM...	62
A. Latar Belakang yang Mendasari Pengedar Narkoba	
dihukum Mati dalam Perspektif Hukum Positif.....	62
B. Kriteria yang Mendasari Pengedar Narkoba dihukum Mati	
dalam Perspektif Hukum Positif	67
C. Latar Belakang yang Mendasari Pengedar Narkoba	
dihukum Mati dalam Perspektif hukum Islam	68
D. Kriteria yang Mendasari Pengedar Narkoba dihukum Mati	
dalam Perspektif hukum Islam.....	75

BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN MATI BAGI	
PENGEDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	78
A. Dari Aspek Latar Belakangnya	78
B. Dari Aspek Kriterianya	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Al-Qur'an Dan Hadis	i
B. Biografi Tokoh.....	iii
C. Data Yang Relevan (Peraturan Perundang-Undangan).....	ix
D. Curriculum Vitae.....	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. Serta efek dari penyalahgunaan narkoba sangat lebih berbahaya di bandingkan dengan khamr. kini khususnya di indonesia narkoba dan obat-obatan terlarang mudah untuk didapatkan. Misalnya dari pengedar /bandar yang menjual dipelosok desa, diskotik dan disekolahan. baik dari kalangan dewasa maupun remaja. Yang lebih mengerikan lagi dimana anak-anak pada usia sekolah dasar sudah banyak menggunakan.

Narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya tidak hanya diminum, tetapi juga disuntik, diisap dan ditaburkan dibagian tubuh yang sudah dilukai. Hal itu karena pengedaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus yang tinggi dan teknologi canggih serta didukung oleh jaringan organisasi luas sehingga sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Dengan demikian, hukuman bagi pengedar narkoba harus jauh lebih keras. Dosa yang terkait dengannya juga lebih besar. Mafia-mafia narkoba dan

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 59-60.

jaringannya saat ini sudah menjadi ancaman yang serius bagi Negara-negara di dunia, oleh karena itu harus ada sikap tegas dengan menerapkan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka, untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya narkoba yang luar biasa. Sesuatu yang berbahaya itu sendiri, harus dibasmi dengan berbagai cara dan menghukum pihak-pihak yang bermain dengannya. Hukuman mati sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat, terutama bagi pengedar maupun bandar narkoba, maka berhak mendapatkan hukuman mati.²

Narkoba tercantum dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 UU 22 tahun 1997 tentang narkotika, yaitu narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga disebutkan bahwa narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 453.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³

Dari kedua definisi di atas memiliki arti yang sama. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkoba yang meliputi : Adanya zat atau obat, asalnya dan akibatnya. Penerapan hukuman mati pada tataran realitasnya selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik dikalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri. Tidak terkecuali karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Lihat saja pada kasus pro-kontra hukuman mati yang muncul pada kasus pengedaran narkoba yang melibatkan sindikat internasional perdagangan obat-obatan terlarang. Pro-kontra muncul terutama berkaitan dengan WNA terpidana mati kasus narkoba yang berasal dari negara lain, terutama Negara yang secara politik dan ekonomi memiliki hubungan dengan Indonesia.⁴

Di Indonesia dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati yang secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia.⁵ Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pihak yang pro terhadap hukuman mati (sekaligus menjadi blok Negara yang mengafirmasi pandangan

³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm 85-86.

⁴ Abdur Rahim, *Hukuman Mati Problem Legsitas Dan Kemanusiaan*, (Malang: In-strans Institute, 2015), hlm 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Cultural Relativisme HAM) tentu saja dengan pendasaran pada pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Sementara dari pejuang HAM baik Nasional maupun Internasional yang kontra, tidak ada bukti empirik sosiologis bahwa hukuman mati bisa memberikan *deterrent effect*. Bagi mereka, hukuman mati adalah bentuk hukuman yang primitif dan berarti kemunduran bagi sistem hukum pidana. Menurut pegiat HAM objektivitas hukuman mati perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat bahwa vonis hukuman mati yang ditetapkan peradilan belum tentu benar adanya. Dengan begitu penegak hukum dalam prakteknya tidak biasa dikatakan objektif dan dampaknya justru berujung pada penegakan hukum yang tidak menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan.⁶

Alasan hukum yang menjadi dasar penolak hukuman mati sebenarnya juga tercantum dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yakni pasal 28A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal ayat 1 UU No 38 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu juga, ada keselarasan dengan ICCPR pasal 6 ayat (1) sebagaimana diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, yang hak hidup tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sedangkan bagi pendukung bagi penerapan hukuman mati juga memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya yang menjadi rujukan ialah pasal 28J UUD 45 sebagai hierarki hukum tertinggi dan perundang-undangan di bawahnya, yakni UU HAM Pasal 1 ayat (2) tentang kewajiban Hak Asasi Manusia, pasal 67, pasal 69 ayat (1) dan (2) dan pasal 70 tentang kewajiban dasar manusia dan pasal 6 ayat (2) UU No 12 Tahun

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

2005 tentang pengesahan ICCPR yang membolehkan penerapan hukuman mati untuk kejahatan yang memiliki daya rusak besar sesuai penafsiran Negara.⁷

Dengan demikian, perdebatan tentang pidana mati walaupun telah berlangsung lama, masih tetap akan ada dan berlanjut di masa yang akan datang. Dalam konteks indonesia perdebatan pidana mati memiliki makna tersendiri mengingat posisi indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. perubahan hukum di indonesia mempengaruhi negara-negara berpenduduk lainnya. Di indonesia, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengeluarkan undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai Undang-Undang Narkotika ini khusus bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan berat tertentu. pemerintah masih memberi batasan bagi yang dipidana hukuman mati, yaitu pada pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan bahwa:

dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika*.

Hukuman mati di pertahankan didalam peraturan yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009, karena pemerintah melihat dari situasi dan kondisi sekarang bahwa pengedar narkoba yang hanya di hukum seumur hidup, di dalam realitanya mereka tidak pernah jera dengan hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada mereka.

Yang menjadi Pertanyaan apakah seorang pengedar narkoba harus di hukum mati? Dalam pidana hukum islam masalah vonis mati bagi Bandar dan pengedar narkoba ini terdapat dua perspektif, yaitu perspektif *hud d* dan *ta'z r*. Melalui perspektif *hud d*, pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau Bandar. Hal itu karena menurut Al-Quran dan hadis, pemabuk hanya dihukum cambuk empat puluh atau delapan puluh kali. Akan tetapi, kalau dilihat dari perspektif *ta'z r*, sangat memungkinkan untuk divonis mati, terlebih bagi pengedar dan bandarnya. Meskipun narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Para ulama sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi khamr. para produsen dan pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.⁹ Dimana dalam tindak pidana ini terdapat unsur membuat kerusakan di muka bumi.

Dalil-dalilnya adalah Firman Allah :

⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm 223.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ¹⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkoba serta menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi bangsa tersebut. Perbuatan seperti itu merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.

Dalam hukum Islam narkoba tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran dan hadis. Keduanya hanya menyebutkan *khamr*. Meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui kias jali, dimana sesuatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya dari pada sesuatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini narkoba lebih besar akibat buruknya daripada *khamr*.¹¹

Majelis Ulama Indonsia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'z r*. Di sisi lain, sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa, akal, dan

¹⁰ Al-M 'idah (5) : 33.

¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 224.

harta.¹² Dengan dalil bahwa pengedar narkoba telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan.mereka layak mendapatkan hukuman *ta'zir*.

Hukum positif dalam kasus narkoba, memutuskan bahwa pengedar narkoba di hukum mati karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi bangsa, yang bahayanya bisa menyebabkan kematian dan pengerusakan terhadap mental generasai penerus bangsa. Pernyataan tegas pemerintah terhadap kejahatan narkoba sebagai tindak kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) serta salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat.¹³

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan UU No 35 tahun 2009. UU tersebut pada dasarnya mengatur narkoba digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkanya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Dalam penetapan hukuman mati yang sesuai dengan syari'at Islam tidaklah mudah, karena negara Indonesia sendiri memiliki latar belakang suku,

¹² *Ibid.*, hlm. 229.

¹³ Abdur Rahim, *Hukuman Mati Problem Legalitas Dan Kemanusiaan*, hlm. 26.

agama, dan budaya. penegakan hukum perlu mendapatkan pengawasan agar hukum tersebut tidak menimbulkan kegoncangan dalam negara.

Dari deskripsi di atas, penyusun ingin melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “ Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis, mencerminkan, metodologi penulisan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penulis memunculkan rumusan permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa alasan yang mendasari hukum Islam dan hukum positif menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang mendasari hukum islam dan hukum positif terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum islam dan hukum positif
2. Kegunaan dari skripsi ini adalah :

- a. Di harapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang hukum islam dan hukum positif mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba persamaan dan perbedaan menurut hukum islam dan hukum positif. Kemudian diharapkan mampu dijadikan dasar untuk membuka wawasan pemikiran dan pengetahuan kita pentingnya analisis hukum dilihat dari sudut pandang tujuan dasar adanya hukum tersebut.
- b. Memberikan penjelasan bahayanya narkoba dan memperluas keilmuan bagi perkembangan hukum islam dan hukum positif serta atas persoalan hukuman mati terhadap kebijakan pemerintah.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun kajian mengenai hukuman mati hukum Islam maupun hukum positif telah banyak dijumpai.

Setelah penulis melacak dan menelaah ada beberapa buku dan skripsi yang memiliki kemiripan tema dan topik bahasan oleh peneliti terdahulu, hal ini dilakukan untuk mencari pembahasan permasalahan yang ada agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Di antara beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan hukuman mati adalah skripsi choirul salim, “Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi” skripsi ini menjelaskan bahwa hukum positif dan fatwa yusuf al-qaradhawi, keduanya membolehkan hukuman mati bagi bandar narkoba. Dengan alasan bahwa akibat dari narkoba itu banyak sekali, salah satunya membunuh bangsa-bangsa. Skripsi tersbut hanya

menjelaskan secara hukum positif dan menggunakan fatwa yusuf al-qaradhawi tanpa menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam secara keseluruhan.¹⁴

Skripsi Shoimatudzakiyah. “Eksekusi Mati Bandar Narkoba Dalam Bingkai SKH Republika dan Kompas Edisi Desember 2014-Januari 2015”. Dalam skripsinya disebutkan eksekusi mati yang diberitakan Republika dan Kompas dibingkai berbeda oleh kedua media tersebut, dari sudut pandang Republika eksekusi mati terpidana Bandar narkoba sebagai masalah agama dan politik yang mengacu pada pendapat-pendapat dari tokoh agama terutama ormas Muhammadiyah dan NU. Kompas melihat eksekusi mati dari segi hukum dan memuat beritanya pada kolom politik dan hukum.¹⁵

Abdur Rahim dalam Bukunya yang berjudul “Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan” Menjelaskan tentang keberadaan pidana mati dari hukum positifnya serta memberi fakta dilapangan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, agar polemik hukuman mati tidak menjadi pertarungan sudut pandang yang sempit, hukuman mati perlu dikaji tidak hanya dalam perspektif hukum dan HAM, melainkan juga perspektif politik, budaya dll. Hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius yang telah menimbulkan banyak korban jiwa terhadap masyarakat tidak melanggar HAM . Bahwa juga disebutkan dalam diskursus HAM sendiri, terdapat dua kubu, antara penganut relativisme

¹⁴ Chairul Salim, “Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi,” *skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

¹⁵ Shoimatudzakiyah, “Eksekusi Mati Bandar Narkoba Dalam Bingkai SKH Republika Dan Kompas Edisi Desember 2014-Januari 2015,” *skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

debagan penganut universalisme. Demikian halnya dengan hukum pidana yang terdapat dua kubu, antara yang menekankan fungsi pemidanaan sebagai pemberian efek jera dengan menekankan fungsi pemidaan sebagai media rehabilitasi. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah fokus pada perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹⁶

Skripsi yang di tulis oleh Lina Muakhiroh dengan judul “Sanksi Penggunaan Narkotika Oleh Anak Studi Kasus Putusan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002”.¹⁷ Penelitian ini difokuskan kepada putusan terhadap pengguna narkotika oleh anak yang dilakukan oleh pengadilan negeri Yogyakarta. Bagaimana dasar dan Pertanggungjawaban pidan anak menurut hukum positif dan hukum islam. Dalam skripsi ini tidak memaparkan hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Dalam beberapa skripsi lain juga ditemukan antara lain: skripsi yang ditulis oleh Nabila Emy Mayasari dengan judul “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) Dan Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta ”¹⁸. dalam skripsi ini dijelaskan upaya yang dilakukan oleh BNN yogyakarta dalam pnecegahan narkoba yaitu pendidikan, penerangan, dan penyuluhan dalam penanggulangannya yaitu razia, dan rehabilitasi, bahwa upaya

¹⁶ Abdur Rahim, *Hukuman Mati Problem Legalitas Dan Kemanusiaan*, (Malang: Intrans Institute, 2015).

¹⁷ Lina Muakhiroh, “Sanksi Penggunaan Narkotika Oleh Anak Studi Kasus Putusan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002,” *skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Jinaya Siyasa), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁸ Nabila Emy Mayasari, “Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) Dan Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta,” *skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Ilmu Hukum), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

tersebut yang dilakukan oleh BNN Yogyakarta dan Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay dalam bukunya yang berjudul “Kontroversi Hukuman Mati”.¹⁹ memaparkan pandangan, analisis, tinjauan kritis para pakar dalam negeri dan luar negeri, juga membahas pandangan pendapat para hakim konstitusi mengenai pidana mati. Selain itu juga membahas peranan Pancasila yang ditetapkan sebagai landasan kefilosofan bagi pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Minrahadi dengan judul “Imperatif Kategoris Dan Relevansinya Dalam Menanggapi Problem Hukuman Mati: Studi Atas Filsafat Moral Immanuel Kant”.²⁰ Yang menjelaskan bahwa Kant berpendapat imperatif tidak lebih dari sekedar aturan praktis yang tidak akan mampu mengikat seluruh makhluk berakal budi. Terdapat lima formula imperatif kategoris, yaitu formula hukum universal, formula hukum kodrat, formula manusia sebagai tujuan, formula otonomi, dan formula kerajaan tujuan akhir. Hukuman mati hanya ditentukan oleh imperatif kategoris. Berbeda dengan pendapat penulisnya bahwa imperatif kategoris tidak dapat dijadikan sarana untuk menjustifikasi hukuman mati karena hal itu akan menciderai kedudukan imperatif kategoris itu sendiri

¹⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Kompas, 2009).

²⁰ Minrahadi, “Imperatif Kategoris Dan Relevansinya Dalam Menanggapi Problem Hukuman Mati: Studi Atas Filsafat Moral Immanuel Kant,” *skripsi* ini tidak diterbitkan, (Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam), Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

sebagai hukum moral, di mana keuniversalan perintahnya tidak lagi dapat dipertahankan. Skripsi ini tidak fokus pada hukuman mati bagi pengedar narkoba saja melainkan hukuman mati secara keseluruhan.

Skripsi Budi Setiawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia Studi Atas Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. Disebutkan bahwa pidana mati bagi tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan HAM dijadikan salah satu pidana di Negara Republika Indonesia karena hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009, artinya penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu pidana mati tercantum didalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional. Penulisan skripsi ini hanya fokus pada hukum Indonesia dan HAM, tidak membahas bagaimana dari sudut pandang hukum islamnya.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Umar Faiz dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba Pada SKH Republika Edisi Mei 2015”. Menjelaskan di dalam berita yang dimuat pada harian Republika, yang sama-sama mengandung optimistis terhadap hukuman mati yang tidak berdampak pada sektor atau bidang apapun. Secara sederhana harian Koran Republika menyetujui terhadap hukuman mati kepada para terpidana mati kasus

²¹ Budi Setiawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia Studi Atas Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *skripsi* ini tidak diterbitkan, (Jurusan Ilmu Hukum), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

narkoba, dengan alasan bahwa hali itu sudah sepantasnya bagi mereka yang terkena hukum yang sudah menjadi sebuah keadilan yang sepadan.²²

Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul “Fatwa Fatwa Kontemporer” beliau membenarkan pemerintah suatu Negara yang menerapkan hukuman mati bagi pedagang dan pengedarnya, dengan alasan karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan, mereka layak diberi hukuman qisas dibandingkan orang yang membunuh manusia.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, sejauh yang penyusun baca, belum ada penelitian secara khusus yang mengkaji mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif .

E. Kerangka Teori

Negara dalam hal ini pemerintah adalah suatu organisasi tertinggi, dimana pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat serta menjadi alat pengatur kehidupan, baik dalam dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Sanksi pidana mati terhadap penyalahgunaan narkoba, hukum islam sanksi sebagai hukuman yang dijatuhkan sepanjang alasan yang dikedepankan adalah untuk kemaslahatn umat. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maq id asy-syar 'ah*. Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif hukum Islam da hukum positif .

²² Umar Faiz, “Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba Pada SKH Republika Edisi Mei 2015,” *skripsi* tidak diterbitkan, (Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam), fakultas dakwah dan komunikasi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Karena sanksi pidana mati dianggap perlu ditetapkan jika bertujuan untuk kemaslahatan.²³ Seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliy t al-Khamsah* (lima hal inti/pokok) yaitu menjaga dan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang mengandung pokok unsur kehidupan manusia tersebut merupakan maslahat.²⁴ Dengan demikian maka akan tercipta keamanan, kesetabilan Negara, dan kemakmuran rakyat.

Pada teori *maq id asy-syar 'ah* disini, dititik puncak perhtaian dalam perlindungan terhadap jiwa, syariat islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dicapai oleh syariat apapun di dunia. Pengedar narkoba ini secara tidak langsung telah membunuh manusia, yang dilakukan dengan cara mengedarkan narkoba dan sejenisnya yang membahayakan dan mengakibatkan kematian itu ke seluruh masyarakat. Hal ini telah keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai sesuatu yang di mulyakan dan dilindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut.

Indonesia adalah sebagai Negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Sanksi Pelaksanaan hukuman mati ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan pro dan kontra. Hukuman mati merupakan

²³ Kemaslahatan berarti sesuatu yang dapat membawa kebaikan atau kesejahteraan manusia, baik jasmani maupun rohani. Lawan dari kemaslahatan adalah kemadlaratan yaitu sesutau yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan umat manusia, baik secara jasmani maupun rohani.

²⁴ Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrument Internasional)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2010), hlm, 96.

hukuman yang paling berat diantara hukuman lainnya.²⁵ Hukuman mati tidak hanya berlaku pada pengedar narkoba, ada juga beberapa produk hukum yang memiliki konsekuensi sanksi berupa hukuman mati, antara lain, kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP), pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP), dan undang-undang tentang narkoba dan obat-obatan terlarang.²⁶

Hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan HAM. Karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang. Membunuh dan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum. Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, hak yang dimiliki setiap orang, siapapun itu tanpa memandang status, agama, suku yang ada mulai dari lahir sampai akhir hayatnya. Di Indonesia Hak untuk hidup diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia terdapat juga dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun hal itu tidak membuat pemerintah tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempertahankan hukuman mati.

²⁵ Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 15.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

Yang menjadi dasar pertimbangan untuk mempertahankan hukuman mati di dalam keadaan yang luar biasa sebagai suatu tindakan darurat, di mana pada waktu menerapkan hukuman mati dibenarkan, dan boleh diterima di dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia.²⁷

Jumhur ulama (mayoritas ulama) telah sepakat bahwa dalil-dalil syari'ah²⁸ tentang hukum-hukum amaliah bersumber pada empat pokok, yaitu Alqur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Pada perkembangan berikutnya, para mujahid berusaha keras untuk mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memahami dan menentukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya.

Dari sudut pandang Islam, narkoba merupakan senyawa yang memang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun Hadits. Pada kenyataannya, narkoba memberikan dampak kerusakan baik secara fisik maupun psikologis.²⁹ Ayat yang mendasari pengharaman tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nis ' ayat 29

اللَّهُ رَحِيمًا³⁰

Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁸ Syari'ah dan Fiqh : syari'ah adalah sebagai aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, sedangkan fiqh adalah perincian dari aturan syari'ah, agar aturan syari'ah implementatif, dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

²⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm 24.

³⁰ An-Nis ' (4) : 29.

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ³¹

Sedangkan di dalam menjelaskan pengharaman narkoba, Yusuf al-qaradhawi di dalam buku *fatwa fatwa kontemporer*, ia menggunakan dalil yang dikemukakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a.:

Yakni yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antar sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.³²

Sudah jelaslah bahwa narkoba sebagai alat perusak dapat dikategorikan sebagai barang haram. Mengkonsumsi narkoba merupakan sebuah kemaksiatan dan menjual narkoba berarti tolong-menolong dalam kemaksiatan. Narkoba juga secara nyata membuat para penggunanya kehilangan kesadaran dan memberikan mudharat yang lebih banyak di banding manfaatnya. Sifat ini menyerupai sifat khamr (segala sesuatu yang memabukkan) yang telah diharamkan dalam Islam.

Pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Karenanya hukuman bagi mereka yang membuat kerusakan di muka bumi adalah salah satu dari empat hukuman sesuai kebijakan pemerintah Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

³¹ Al-Baqarah (2) : 195

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad, cet Ke-3 (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm 792.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي عَذَابٍ عَظِيمٍ³³

Dapat dipahami bahwa orang-orang yang mencoba mendurhakai (memerangi) Allah adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga sanksinya amatlah berat. Dasar tersebut merupakan wujud izin Allah SWT. Diterapkannya hukuman mati dengan harapan dapat menjadi pelajaran bagi setiap manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang hukamannya diancam dengan hukuman mati seperti penyalahgunaan maupun pengedar narkoba.

melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba maka hukuman yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Demikian juga hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah Islam adalah hukuman mati (ini disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat, namun hasil dari penetapan pemerintah Islam. Jika ditetapkan oleh syariat disebut *hud d*, misalnya hukuman potong tangan.)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³³ Al-M 'idah (5) : 33.

Dalam penelitian ini termasuk menggunakan penelitian pustaka, penelitian yang menggunakan buku, internet dan lain-lainnya sebagai sumber data, baik dari segi primer maupun sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis-komparatif. Yaitu memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis dan memberikan gambaran yang tepat, dan jelas terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan komparatifnya adalah penelitian dengan membandingkan dua objek kajian hukum Islam dan hukum positif sehingga memberikan pandangan baru dan menjelaskan objek tersebut.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk membandingkan hukum Islam dengan hukum positif dan juga dilihat dari segi Hak Asasi Manusia terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dan mendukung penelitian ini. Adapun sumber datanya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. sumber data primer dari hukum Islam meliputi al-Qur'an, al-Hadis dan fiqh dan dari hukum positif berupa perundang undangan tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba Undang-Undang Narkotika Nomer 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati

terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2. sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan data tertier berupa kamus-kamus hukum baik hukum Islam maupun hukum positif.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis untuk menggali data-data berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Pendekatan yuridis ini berfungsi untuk mengetahui tentang pidana narkoba dan jenis-jenis hukuman yang diberikan bagi pengedar narkoba menurut hukum positif dalam hal ini UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan pendekatan normatifnya yaitu berdasarkan atas norma agama seperti Al-Qur'an, hadis maupun fikih. Pendekatan ini berfungsi untuk mencari persamaan dan perbedaan hukum Islam dengan hukum positif.

5. Analisis Data

Metode komparatif: yaitu metode dengan cara berfikir dan menganalisa data-data dalam segi tinjauan ketentuan sanksi hukum masalah hukuman mati bagi pengedar narkoba kemudian di bandingkan antara hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah kajian dan pembahasan penelitian ini, penyusun membaginya menjadi beberapa bab dengan bahasan sebagai berikut:

BAB I, Menjelaskan latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Dilanjutkan dengan pokok masalah dalam bentuk pertanyaan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, tujuan dan kegunaan menunjukkan kepada suatu hal yang akan dicapai dan diberikan dari penelitian ini, untuk menghindari plagiasi maka dibutuhkan perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam bentuk telaah pustaka, kerangka teori, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan pada pokok masalah, dibutuhkan suatu metode yang tertuang metode penelitian, dan agar tidak terlalu meluas maka ditentukan rangkaian penulisan dan pembahasan penelitian dalam sebuah sistematika pembahasan.

BAB II, Menjelaskan pendefinisian narkoba dan pengedar narkoba secara umum dan pendapat para ahli yang mendefinisikan, bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba, permasalahan narkoba di Indonesia, factor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika, dan tindak pidana narkoba dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB III, Menjelaskan hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum islam dan hukum positif, dari aspek latar belakang kriteria yang mendasari di hukum mati dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

BAB IV, Merupakan analisis hukum tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dilihat dari aspek latar belakang dan dari aspek kriterianya.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, penyusun mendeskripsikan tentang pengedar narkoba dalam hukum islam dan hukum positif yang menyangkut hukuman mati yang secara keseluruhan merupakan jawaban dari pokok permasalahan, sebagaimana disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan.

1. Persamaan kriteria hukum positif dan hukum islam. Persamaanya adalah hukuman mati dijatuhkan kepada pengedar narkoba yang apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali, walaupun dulunya sudah dikenakan sanksi atau hukuman. Perbedaannya hukum positif dalam menetapkan hukuman mati dipengaruhi oleh seberapa berat narkoba yang diedarkan serta jenis narkoba yang diedarkan. yang perbuatannya dengan sengaja memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (batang) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sedangkan hukum islam membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila orang tersebut telah menghalalkan narkoba dan tidak mau bertobat atas perbuatannya.
2. Persamaan latar belakang antara hukum positif dan hukum islam menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu, sama-sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dengan alasan bahwa akibat dari narkoba itu banyak sekali, akan merugikan pengguna bahkan menyebabkan

akibat fatal, menghancurkan potensi sosial, dapat merusak keamanan, dan dapat menimbulkan perbuatan kriminal serta dapat membunuh bangsa-bangsa.

Perbedaan latar belakang hukum positif menggunakan UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu pasal 113 ayat (2).hal tersebut berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dapat membahayakan orang lain, menyebabkan orang lain cacat permanen bahkan mengancam nyawa seseorang. Sedangkan hukum islam menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad para sahabat. Hal tersebut berdasarkan pada teori *maslahah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Hendaknya para generasi muda mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugrah yang Maha Kuasa dan menghindari diri dari hal-hal yang berbau narkoba,
2. pemerintah dan masyarakat terutama bagi orang tua itu sendiri harus berperan aktif dalam usaha membebaskan bangsa dari bahaya Narkoba, dan menghukum paling berat siapapun yang melakukan kejahatan tanpa terkecuali.
3. Narkoba bukan penyelesaian masalah, tetapi memperparah masalah. Hadapi dan pecahkan masalah itu, bukan dihindari, apalagi melarikan diri kepada penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2011.

2. Al-Hadits

Ab D wud, *Sunan Ab D wud*, Beirut: D r al-Fikr, 1994.

3. Fiqh / Ushul Fiqh/ Ilmu Hukum

Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Bidang Sosial dan Budaya)*, ttp: Emir, 2015.

Bahammam, Salim Fahad, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: PT Gramedia, t.t.

Djazui, H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Hakim, Arief, *Bahaya Narkoba Alkohol (Cara Islam, Mengatasi, Dan Melawan)*, Bandung: Nuansa, 2004.

Ibnu, Daqiq, *Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam*, alih bahasa Jamaluddin Rois, Hafidz, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Irvan, Nurul M, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Lubis, Mulya Todung dan Lay Alexander, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: 4 KOMPAS, 2009.

Makarao, Taufik M, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Masyrofah, Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, cet. Ke-I, Jakarta: AMZAH, 2013.

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin. cet Ke-1, Jakarta: Gema Insani press, 2001.

_____, *Halal Dan Haram*, alih bahsa Abu Sa'id Al-Falahi dkk, cet. Ke-I, Jakarta: Robbani Press, 2000.

- Rahim, Abdur dkk, *Hukuman Mati Problem Legalitas Dan Kemanusiaan*, Malang: In-trans Institute, 2015.
- Salim, dan Rodliyah , *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sulistyawati, Sri Purba Nelvita , *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sutrisno, Budi Dawud, *Peraturan Dan Penerapan Hukum Pidana Narkoba*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.
- Willy, Heriadi, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, Granat, UII Pres, 2005.
- Yafie, Ali, dkk. (Ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. Ke-I, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, alih bahasa Abdul Hayyi Al-Kattani, Arif Muhajir, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 20011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, pasal 113 ayat (2).
- Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika, Bandung: FOKUSMEDIA, 2013.

5. Sikripsi

- Budi, Setiawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Mati Di Indonesia Studi Atas Sanksi Hukuiman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *skripsi*

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2015).

Minrahadi, "Imperatif Kategoris Dan Relevansinya Dalam Menanggapi Problem Hukuman Mati: Studi Atas Filsafat Moral Immanuel Kant", *skripsi* Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2017).

Muakhiroh, lina, "Sanksi Penggunaan Narkotika Oleh Anak Studi Kasus Putusan Dipengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002", *skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2008).

Nabila, Emy Mayasari, "Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) Dan Polri Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkoba Di Yogyakarta", *skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2015).

Salim, Chairul, "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi", *skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2013).

Shoimatudazakiyah, "Eksekusi Mati Bandar Narkoba Dalam Bingkai SKH Republika Dan Kompas Edisi Desember 2014-Januari 2015", *skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2015).

Umar, Faiz, "Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Kasus Narkoba Pada SKH Republika Edisi Mei 2015", *skripsi* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2015).

6. Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Vers Luys, 1992.

7. Lain-lain

Amir, P. Ali Dan Imran Duse M, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Samarinda: DPD KNPI Kalimantan Timur, 2007.

Departemen Ilmiah- Madar Al-Wathan, *Narkoba Menuju Gerbang Kehancuran*, Jakarta: DARUL HAQ, 2016.

Dirdjosisworo Soedjono, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan)* , Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2006.

Majalah, *Republic Darurat Narkoba*, Jakarta: Rumah Yatim, 2013.

Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrument Internasional)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Wresniwiro, dkk, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, ttp: MITRA BINTIBMAS,t.t.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
1	7	10	Al-Mā'idah (5) : 33.	"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar."
	18	30	An-Nisā' (4): 29	"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".
	19	31	Al-Baqarah (2): 195	"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"
	20	33	Al-Mā'idah (5) : 33.	"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar".
	19			Khamar ialah segala sesuatu yang menutup akal
3	69	3	Al-Mā'idah (5) : 90	hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
	71	6	Al-A'rāf (7): 157	"...dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."

	69	4		Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda “setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah aharam”
	70	5		Rasulullah melarang dari setiap yang memabukkan dan melemahkan.
	71	7	<i>Sunan Ibnu Majah</i>	Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya.
4	79	1	<i>Sunan Abū Dāwud</i>	Barang siapa yang minum khamr maka deralah ia, kemudian apabila ia mimun lagi deralah ia, jika ai minum lagi keempat klainya maka bunuhlah ia.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) atau lebih dikenal sebagai salah satu imam mazhab fiqh. Abu Hanifah / imam Hanafi juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lain

Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat.

Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun.

Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya.

Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim), akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut – karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) – maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun, dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter.

Karya-karya nya Imam Abu Hanifah :

1. *Masailul –Ushul* (masalah-masalah pokok)
2. *Kitab Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)
3. *Kitab Al-Jaami'ush shaghir* (himpunan kecil)
4. Dan lain-lain.

B. Imam Syafi'i

Abu 'Abdulah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari abd-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanjī sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanjī yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

C. Abdul Qadir Audah

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim yang berkeahlian dalam bidang Fiqh. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'i fil Islam Muqarrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan Hukum syariat atas undang-undang konvensional. Buku ini telah menjadi referensi ulama', ahli fiqh, praktisi hukum dan dosen di berbagai universitas.

Ustaz Abdul Kadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, Da'i Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua orang, memiliki posisi yang tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustaz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwah Islam.

Ustaz Abdul Kadir Audah termasuk orang-orang Ikhwan yang mendukung Revolusi 23 Juli 1952 dan berbaik sangka kepada Gamal Abdul Nasir dan memandang baik

tindakannya karena dia adalah perwira dari Ikhwanul Muslimin yang wajib diberi dukungan. Ini karena ia mengira Gamal Abdul Nasir merealisasikan kebaikan yang dinyatakan di depan rakyat. Dukungan beliau ini telah mengundang kemarahan banyak Ikhwan dan para pecintanya. Namun setelah tersebar bahaya Gamal Abdul Nasir, beliau menjadi orang yang paling lantang menentang segala pembohongan dan kezalimannya.

Ketika terjadi perselisihan antara Ikhwanul Muslimin dengan Perwira Revolusi yaitu Gamal Abdul Nasir yang telah meluapkan permusuhannya, pembohongannya, mengingkari semua janji dan konsensus yang dibuat olehnya, mengkhianati amanah dan mengepung Ikhwanul Muslimin, Ustaz Abdul Qadir Audah saat itu sebagai Wakil Am Ikhwanul Muslimin mengeluarkan manifesto bersejarah yang dpanggil Hadza Bayanu linnaas yang menyatakan menolak semua dakwaan Gamal Abdul Nasir, kebohongan-kebohongan, dan tuduhannya.

As-Syahid Abdul Qadir Audah menjalankan aktivitas dakwah dan tanggung jawabnya di dalam Jemaah Ikhwan Al-Muslimin sampai ia syahid di tiang gantungan pada 7 Desember 1954 atas perintah Gamal Abdul Nasir yang sangat dendam kepada Ustadz Abdul Qadir Audah karena posisinya dan kekuatan pribadi As-Syahid. Abdul Qadir Audah dihukum mati bersama rekan-rekannya yang mulia yaitu: As-Syahid Muhammad Farghali, As-Syahid Yusuf Thal'at, As-Syahid Ibrahim Ath-Thayyib, As-Syahid Mahmud Abdul Latif, dan As-Syahid Hindawi Duwair.

Pelaksanaan hukuman gantung terhadap keenam Syuhada 'ini bertahan satu demi satu di penjara Mesir selama 3 jam. Pada hari itu, kebencian dan kemurkaan memenuhi penjuru dunia Islam. Gamal Abdul Nasir secara lalim telah memilih untuk membunuh secara lalim keenam pejuang Islam atas dasar kebencian. Ketika Penguasa mengiringi Abdul Qadir Audah bersama teman syuhada 'yang lain untuk dihukum mati, Hakim As-Syahid Abdul Qadir Audah maju ke tiang gantungan dengan berani dan hatinya mendekatkan diri kepada Allah dengan menerima takdirnya. Kata terakhir yang beliau ucapkan sebelum dieksekusi adalah: "Darahku akan menjadi laknat atas pemimpin-pemimpin revolusi".

D. Yusuf al-qaradhawi

Syaikh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.

Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo,

Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qardhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

LAMPIRAN III

DATA YANG RELEVAN

(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

BAB	Halaman	Footnote	Pasal	Terjemahan
2	28		Pasal 1.	“(1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.
	28		Pasal 111.	“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana panjang seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
	28		Pasal 112.	“(1)..Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

				<p>(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>“(2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
	28		Pasal 113.	<p>(2)...dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
	28		Pasal 129.	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

				<p>Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.</p>
	28		Pasal 59	<p>“(1) barang siapa:</p> <p>a. Menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); atau</p> <p>b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau</p> <p>c. Mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau</p> <p>d. Mengimpor psikotropika golongan 1 selain kepentingan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>e. Secara tanpa hak milik, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>
	28		Pasal 85.	<p>Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil</p>

				tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
	28		Pasal 86.	<p>“(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. tulisan, suara, dan atau gambar; 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ali Qudsi

Tempat, tanggal lahir : sumenep, 22 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Platokan, Prancak, Pasongsongan, Sumenep, Madura

Alamat di Yogyakarta : Jln. Jatempanol 04/01 Nologaten, Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta, DIY.

Email : Denzizi82@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2000-2006 : SDN Prancak III Sumenep Madura.

2006-2009 : MTs 1 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura.

2009-2012 : SMA 1 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ali Qudsi